

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KECAMATAN PASAR REBO

Jl. Raya Bogor Km. 27 Telepon : 021-8710233, 021-8712661 Fax : 021-8711217
email : kecamatan.pasarrebo@gmail.com

Kode Pos : 13710

Nomor : 158 / OT.06

27 Mei 2025

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Laporan Hasil Pelaksanaan
SKM Semester I Tahun 2025
Kecamatan Pasar Rebo

Kepada
Yth. Walikota Kota Administrasi
Jakarta Timur
di

Jakarta

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dan Hasil Rapat Persiapan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Semester I Tahun 2025 Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur serta sehubungan telah dilaksanakannya kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat tanggal 9 April s.d 7 Mei 2025 di Kelurahan Kecamatan Pasar Rebo, bersama ini disampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Semester I Tahun 2025 dilaksanakan terhadap 7 (tujuh) indikator layanan yaitu Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), Ketertiban Umum (Tibum), Juru Pemantau Jentik Nyamuk (Jumantik), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) serta RT, RW, LMK dan FKDM.
2. Berdasarkan hasil survei, diperoleh IKM Kelurahan-Kelurahan yang menjadi agregat Tingkat Kecamatan (IKM Kecamatan). Adapun IKM Kecamatan Pasar Rebo Semester I Tahun 2025 adalah 99,60 dan masuk dalam kategori A (Sangat Baik) sebagaimana tercantum dalam Permen PAN RB 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
3. Laporan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pasar Rebo Semester I Tahun 2025, terlampir.

Demikian ...

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih..



Camat Kecamatan Pasar Rebo

Mujiono S.Pd, M.Hum
NIP. 197012111998031003

Tembusan :

1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Timur
4. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan pelayanan Publik Setko Kota Administrasi Jakarta Timur

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,59	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,06	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,07 – 3,53	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,54 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Kertas Ukuran A4

1. Dilaporkan ke Walikota
2. Ditembuskan ke Bagian KKPP (dengan mengunggah Laporan SKM Kecamatan dan SKM Kelurahan pada google drive melalui link yang ada pada lampiran I)

LAPORAN
PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
SEMESTER I TAHUN 2025



KECAMATAN PASAR REBO

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. 1. Latar Belakang.....	1
1. 2. Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	1
1. 3. Maksud dan Tujuan	3
BAB II PENGUMPULAN DATA SKM DARI UPP.....	5
BAB III. HASIL PELAKSANAAN SKM KELURAHAN	6
BAB IV ANALISIS HASIL SKM	9
4. 1. Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan	9
4. 2. Tren Nilai SKM	11
BAB V KESIMPULAN.....	12
LAMPIRAN.....	13
1. Bukti Dukung Laporan Pelaksanaan SKM Pada Kelurahan Kecamatan.....	13
2. Foto-foto Pendukung Kegiatan	14
3. Keputusan Camat tentang pembentukan tim.....	15
4. Nilai Per unsur di masing-masing Kelurahan.....	18
5. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Semester II Tahun 2024	23

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Diberlakukannya Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, memberikan pedoman bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan di wilayah Kecamatan Pasar Rebo maka perlu diselenggarakan survei pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh penyedia publik. Caranya dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Hasil survei sangat penting sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyedia layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan terbaik dapat segera dicapai, dan akhirnya dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat akan hak-hak mereka sebagai warga negara.

1. 2. Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

Dasar hukum penyusunan Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2019 mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
7. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

8. Peraturan Gubernur Nomor 197 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 72130);
9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);
10. Instruksi Gubernur Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
11. Keputusan Walikota Nomor e-0006 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025;
12. Keputusan Camat Kecamatan Pasar Rebo Nomor e-0008 Tahun 2025 Tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Di Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Rimur Tahun 2025

1. 3. Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran Kepuasan Masyarakat, yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan di lingkup Kecamatan Pasar Rebo

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Dengan dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM DARI UPP

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sejak tahun 2019 hal ini berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur dilaksanakan di :

1. Kelurahan Gedong
2. Kelurahan Cijantung
3. Kelurahan Baru
4. Kelurahan Kalisari
5. Kelurahan Pekayon

Stakeholder pada pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta terdiri dari:

1. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi selaku pembina, perumusan kebijakan dan pendamping dalam kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat
2. Kelurahan Kecamatan Pasar Rebo selaku pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat dan penyusunan laporan
3. Dinas Kominfotik selaku pengembangan aplikasi *Jaksurvei-Jaki*, penentuan sampling, verifikasi *setting kuesioner*, *grouping* verifikasi responden, *helpdesk*, *monev*, *cleansing* serta analisis data

Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan Survei Kepuasan Masyarakat yang sudah dilakukan, sebanyak 5 (lima) Kelurahan telah menyampaikan laporannya.

No	Kelurahan	Periode Pelaksanaan	Nilai Per Unsur							IKM	Kategori	Jumlah responden	Metode SKM	Unsur Prioritas	Rencana Tindak Lanjut	Realisasi Tindak Lanjut
														3 Biaya/Tarif	Melakukan rapat koordinasi, pengawasan dan evaluasi	

BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4. 1. Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh IKM Kecamatan Kecamatan Pasar Rebo yaitu 99.60, dapat diketahui bahwa :

1. Persyaratan mendapatkan nilai terendah yaitu 99,54 Selanjutnya Waktu Penyelesaian yang mendapatkan nilai 99,55 adalah nilai terendah kedua dan Biaya/Tarif termasuk tiga unsur terendah dengan nilai 99,55
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu unsur mendapatkan nilai tertinggi 99,66 adalah unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan dan Perilaku Pelaksana serta untuk Kompetensi Pelaksana mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 99,63

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- Melakukan rapat monitoring dan evaluasi kinerja anggota PPSU Kelurahan
- Melakukan pengawasan (monitoring) dan evaluasi pekerjaan.
- Melakukan rapat koordinasi, pengawasan dan evaluasi

(Dapat melihat berdasarkan tarikan SKM)

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Persyaratan
Hal ini mengindikasikan perlunya perbaikan dan penajaman prosedur serta persyaratan layanan publik, khususnya terkait Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), Ketertiban Umum (Tibum), dan peran RT/RW/LMK/FKDM. Sosialisasi yang lebih efektif mengenai persyaratan yang telah diperbaiki juga direkomendasikan untuk meningkatkan pemahaman dan kepuasan masyarakat.
- Penyelesaian

perlunya rencana tindak lanjut yang komprehensif, termasuk rapat koordinasi, pengawasan, dan evaluasi kinerja, serta sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelesaian permasalahan di masa mendatang. Laporan juga mencatat upaya perbaikan yang telah dilakukan dan rencana tindak lanjut untuk periode berikutnya.

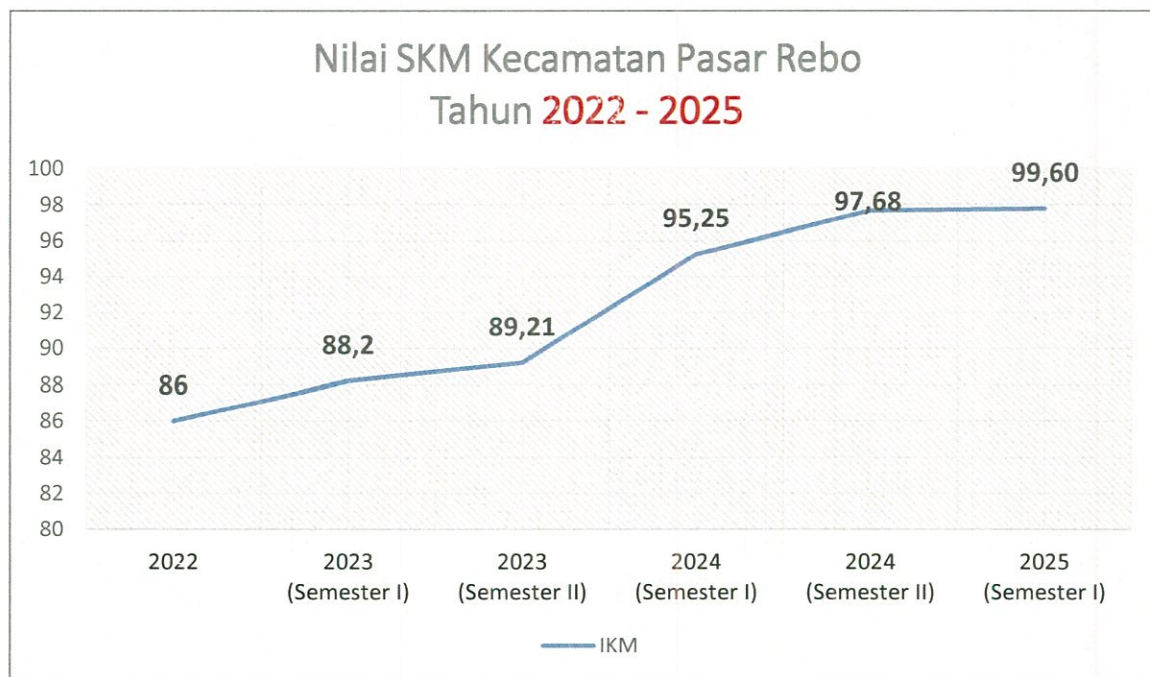
- **Biaya/Tarif**

Perbaikan ini penting untuk meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat, dan memerlukan evaluasi serta sosialisasi yang efektif mengenai struktur biaya dan mekanisme pembayaran kepada masyarakat. Laporan merekomendasikan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan ini sebagai bagian dari rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan.

(menjelaskan permasalahan terhadap capaian unsur terendah dapat dilihat dari laporan SKM Kelurahan)

4. 2. Tren Nilai SKM

Jika melihat kecenderungan (trend) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik, trend tingkat kepuasan penerima layanan di Kecamatan Pasar Rebo dapat dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2022 hingga Semester I Tahun 2025 di lingkup Kecamatan Pasar Rebo

BAB V

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode yakni pada Semester I Tahun 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pelayanan publik di lingkup Kecamatan Pasar Rebo, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM Semester I Tahun 2025 yaitu 99,60 Nilai IKM di lingkup Kecamatan Pasar Rebo menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2022 hingga Semester I 2025.
2. Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan SKM yang sudah dilakukan, sebanyak 5 Kelurahan telah menyampaikan laporannya.

Dari seluruh Kelurahan yang telah melaporkan hasil SKM, telah terdapat rencana tindak lanjut terhadap unsur layanan yang menjadi prioritas perbaikan. Inovasi pelayanan publik dalam bentuk terobosan-terobosan pelayanan diperlukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik agar kepuasan masyarakat meningkat.

Jakarta, 27 Mei 2025

Camat Kecamatan Pasar Rebo



Mujiono, S.Pd, M.Hum
NIP 197012111998031003

LAMPIRAN

1. Bukti Dukung Laporan Pelaksanaan SKM Pada Kelurahan Kecamatan Pasar Rebo

No	UKPD*	Link Laporan Pelaksanaan SKM
1	Kelurahan dan Kecamatan Matraman	https://bit.ly/SKMsemestersatu2025matraman
2	Kelurahan dan Kecamatan Pulogadung	https://bit.ly/SKMsemestersatu2025pulogadung
3	Kelurahan dan Kecamatan Jatinegara	https://bit.ly/SKMsemestersatu2025jatinegara
4	Kelurahan dan Kecamatan Kramat Jati	https://bit.ly/SKMsemestersatu2025kramatjati
5	Kelurahan dan Kecamatan Pasar Rebo	https://bit.ly/SKMsemestersatu2025pasarRebo
6	Kelurahan dan Kecamatan Cakung	https://bit.ly/SKMsemestersatu2025Cakung
7	Kelurahan dan Kecamatan Duren Sawit	https://bit.ly/SKMsemestersatu2025durensawit
8	Kelurahan dan Kecamatan Ciracas	https://bit.ly/SKMsemestersatu2025ciracas
9	Kelurahan dan Kecamatan Makasar	https://bit.ly/SKMsemestersatu2025makasar
10	Kelurahan dan Kecamatan Cipayung	https://bit.ly/SKMsemestersatu2025cipayung

**pilih sesuai lokasi unit kerja*

RTLSKMsemestersatu2025cipayung

2. Foto-foto Pendukung Kegiatan



3. Keputusan Camat tentang pembentukan tim



CAMAT KECAMATAN PASAR REBO KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

**KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN PASAR REBO
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR c-0008 Tahun 2025**

TENTANG

**TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI WILAYAH KECAMATAN PASAR REBO KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA TIMUR TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

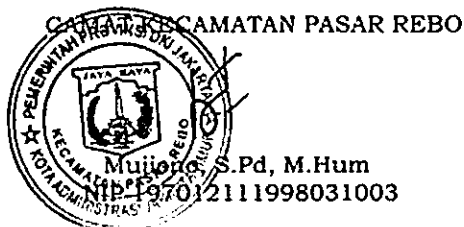
**CAMAT KECAMATAN PASAR REBO
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,**

- Menimbang :** a. bahwa salah satu upaya pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan, juga sebagai bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu mendapat perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Camat Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Pembentukan Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2021;
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

- d. Melakukan perhitungan terhadap hasil Survei Kepuasan Masyarakat.
 - e. Membuat laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan disampaikan ke Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur secara berjenjang.
5. Sekretariat
- a. Mengolah data laporan dari Kecamatan dan memverifikasi hasil penilaian di Tingkat Kelurahan Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur secara berjenjang.
 - b. Menyampaikan laporan dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat di Tingkat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Timur Kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 April 2025



Tembusan:

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Timur;
3. Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Administrasi Jakarta Timur;
4. Kabag Kepegawaian dan Tata Laksana Kota Administrasi Jakarta Timur;
5. Para Lurah Se-Kecamatan Pasar Rebo.

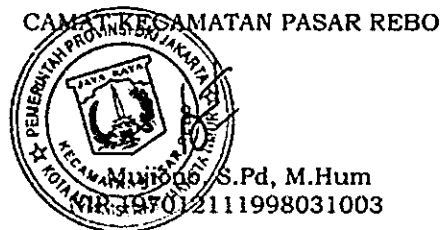
Lampiran : Keputusan Camat Kecamatan Pasar Rebo

Nomor : c-0008 Tahun 2025

Tanggal : 8 April 2025

**TIM PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI WILAYAH KECAMATAN PASAR REBO
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2025**

- Pengarah** : Camat Kecamatan Pasar Rebo
- Penanggung Jawab** : a. Wakil Camat Kecamatan Pasar Rebo
b. Sekretaris Kecamatan Pasar Rebo
- Ketua** : a. Kepala Seksi Pemerintahan
b. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan
Lingkungan Hidup
c. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
- Sekretariat** : Para Kasubbag Kecamatan Pasar Rebo
- Anggota** : a. Unsur Staf Seksi Pemerintahan
b. Unsur Staf Seksi Ekonomi Pembangunan dan
Lingkungan Hidup
c. Unsur Staf Seksi Kesejahteraan Rakyat



4. Nilai Per unsur di masing-masing Kelurahan

a. Nilai IKM di Kelurahan Gedong

(Seluruh Kelurahan di Bawah Kecamatan di lampirkan)

Jenis Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan (Unsur /U)									IKM Layanan
	Persyaratan (U1)	Sistem, Mekanisme, Prosedur (U2)	Waktu (U3)	Biaya (U4)	Spesifikasi jenis pelayanan (U5)	Kompetensi Pelaksana (U6)	Perilaku Petugas Pelayanan (U7)	Penanganan saran dan aduan (U8)	Sarana pendukung pelayanan (U9)	
Jumantik	3,98	3,98	3,98	3,99	3,96	3,97	3,99	3,99	3,98	3,98
Ketertiban Umum	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,99	3,98	3,99
PKK	3,97	3,97	3,97	3,97	3,96	3,95	3,96	3,96	3,95	3,96
Posyandu	3,93	3,95	3,94	3,96	3,93	3,96	3,96	3,96	3,95	3,95
PPSU	3,98	3,98	3,96	3,98	3,98	3,96	3,98	3,97	3,92	3,97
RPTRA	3,98	3,98	3,98	3,97	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98
RT/RW, LMK dan FKDM	3,96	3,96	3,96	3,97	3,96	3,97	3,96	3,96	3,96	3,96
IKM per unsur	3,97	3,97	3,97	3,98	3,97	3,97	3,98	3,97	3,96	3,97
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Rata-rata IKM Layanan	99,26 (A atau Sangat Baik)									

b. Nilai IKM di Kelurahan Cijantung

(Seluruh Kelurahan di Bawah Kecamatan di lampirkan)

Jenis Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan (Unsur /U)									IKM Layanan
	Persyaratan (U1)	Sistem, Mekanisme, Prosedur (U2)	Waktu (U3)	Biaya (U4)	Spesifikasi jenis pelayanan (U5)	Kompetensi Pelaksana (U6)	Perilaku Petugas Pelayanan (U7)	Penanganan saran dan aduan (U8)	Sarana pendukung pelayanan (U9)	
Jumantik	4,00	4,00	4,00	3,99	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Ketertiban Umum	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
PKK	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Posyandu	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
PPSU	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
RPTRA										
RT/RW, LMK dan FKDM	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98	3,98
IKM per unsur	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Rata-rata IKM Layanan	99,92 (A atau Sangat Baik)									

c. Nilai IKM di Baru

(Seluruh Kelurahan di Bawah Kecamatan di lampirkan)

Jenis Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan (Unsur /U)									IKM Layanan
	Persyaratan (U1)	Sistem, Mekanisme, Prosedur (U2)	Waktu (U3)	Biaya (U4)	Spesifikasi jenis pelayanan (U5)	Kompetensi Pelaksana (U6)	Perilaku Petugas Pelayanan (U7)	Penanganan saran dan aduan (U8)	Sarana pendukung pelayanan (U9)	
Jumantik	3.99	4.00	3.99	3.98	3.99	4.00	3.98	3.98	3.99	3.98
Ketertiban Umum	3.99	3.99	3.99	4.00	3.99	4.00	3.99	3.99	3.99	3.99
PKK	3.99	3.99	3.98	3.99	3.99	4.00	3.99	3.99	3.99	3.99
Posyandu	3.99	3.99	3.99	4.00	3.98	4.00	3.98	4.00	3.99	3.99
PPSU	3.96	4.00	3.99	3.98	3.99	3.98	4.00	3.99	3.99	3.99
RPTRA	3.99	3.98	3.98	3.98	3.98	4.00	3.99	3.98	3.99	3.98
RT/RW, LMK dan FKDM	3.99	4.00	3.99	3.98	3.99	4.00	3.98	3.98	3.99	3.98
IKM per unsur	3.99	3.99	3.99	3.99	3.99	4.00	3.99	3.99	3.99	3,99
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Rata-rata IKM Layanan	99.77 (A atau Sangat Baik)									

d. Nilai IKM di Kelurahan Kalisari

(Seluruh Kelurahan di Bawah Kecamatan di lampirkan)

Jenis Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan (Unsur /U)									IKM Layanan
	Persyaratan (U1)	Sistem, Mekanisme, Prosedur (U2)	Waktu (U3)	Biaya (U4)	Spesifikasi jenis pelayanan (U5)	Kompetensi Pelaksana (U6)	Perilaku Petugas Pelayanan (U7)	Penanganan saran dan aduan (U8)	Sarana pendukung pelayanan (U9)	
Jumantik	3,97	3,97	3,98	3,98	3,97	3,98	3,98	3,98	3,98	3,99
Ketertiban Umum	3,97	3,97	3,98	3,97	3,98	3,97	3,97	3,97	3,98	3,99
PKK	3,98	3,98	3,99	3,98	3,99	3,99	3,99	3,98	3,99	3,99
Posyandu	3,97	3,97	3,98	3,97	3,98	3,98	3,97	3,98	3,98	3,99
PPSU	3,94	3,95	3,93	3,98	3,97	3,97	3,94	3,97	3,97	3,54
RPTRA										
RT/RW, LMK dan FKDM	3,96	3,98	3,98	3,99	3,97	3,98	3,97	3,99	3,99	3,99
IKM per unsur	3,97	3,97	3,98	3,98	3,98	3,98	3,97	3,98	3,98	3,99
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Rata-rata IKM Layanan	99,41 (A atau Sangat Baik)									

e. Nilai IKM di Kelurahan Pekayon

(Seluruh Kelurahan di Bawah Kecamatan di lampirkan)

Jenis Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan (Unsur /U)									IKM Layanan
	Persyaratan (U1)	Sistem, Mekanisme, Prosedur (U2)	Waktu (U3)	Biaya (U4)	Spesifikasi jenis pelayanan (U5)	Kompetensi Pelaksana (U6)	Perilaku Petugas Pelayanan (U7)	Penanganan saran dan aduan (U8)	Sarana pendukung pelayanan (U9)	
Jumantik	3,98	3,98	3,98	3,98	3,97	3,99	3,98	3,99	3,99	3,98
Ketertiban Umum	4,00	3,99	3,99	4,00	3,99	3,99	3,98	3,98	3,99	3,99
PKK	3,98	3,97	3,98	3,98	3,97	3,97	3,98	3,99	3,98	3,98
Posyandu	3,99	3,98	3,97	3,99	3,98	3,98	3,99	3,98	3,98	3,98
PPSU	3,99	3,99	3,97	4,00	3,99	3,98	4,00	3,99	4,00	3,99
RPTRA	3,99	4,00	3,98	4,00	3,98	4,00	4,00	4,00	3,98	3,99
RT/RW, LMK dan FKDM	3,98	3,97	3,98	3,98	3,99	3,98	3,97	3,98	3,99	3,98
IKM per unsur	3,99	3,98	3,98	3,99	3,98	3,98	3,99	3,99	3,99	3,99
Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
Rata-rata IKM Layanan	99,65 (A atau Kurang Baik)									

5. Laporan Hasil Tindak Lanjut SKM Semester I Tahun 2025

No	UKPD*	Link Laporan Pelaksanaan SKM
1	Kecamatan Matraman	https://bit.ly/SKMsemesterdua2024Matraman
2	Kecamatan Pulogadung	https://bit.ly/SKMsemesterdua2024kecpulogadung
3	Kecamatan Jatinegara	https://bit.ly/SKMsemesterdua2024jatinegara
4	Kecamatan Kramat Jati	https://bit.ly/SKMsemesterdua2024kramatjati
5	Kecamatan Pasar Rebo	https://bit.ly/SKMsemesterdua2024pasarrebo
6	Kecamatan Cakung	https://bit.ly/SKMsemesterdua2024cakung
7	Kecamatan Duren Sawit	https://bit.ly/SKMsemesterdua2024durensawit
8	Kecamatan Ciracas	https://bit.ly/SKMsemesterdua2024ciracas
9	Kecamatan Makasar	https://bit.ly/SKMsemesterdua2024makasar
10	Kecamatan Cipayung	https://bit.ly/SKMsemesterdua2024cipayung

**pilih sesuai lokasi Unit Kerja*